

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA
(Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Faizah Wachdin
0613010072/FE/EA

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2010**

USULAN PENELITIAN

**ANALISIS PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung)**

yang diajukan

**Endah K. Setiawati
0613010050/FE/EA**

Disetujui untuk Ujian Lisan oleh

Pembimbing Utama

**Prof.Dr.H.Soeparlan Pranoto, MM, Ak
NPT : 977 100 164**

Tanggal :

**Mengetahui
Ketua ProgdI Akuntansi**

**Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi
NIP. 030 217 167**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya) “**, dengan lancar.

Adapun maksud penyusunan skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pengarahan serta bimbingan, bantuan, berkat semangat dan dukungan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya. oleh karena itu, dalam hal ini secara khusus peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. H. Dhani Ichsanuddin Nur, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Saiful Anwar, MSi selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi selaku Ketua Progdil Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Dra. Ec. Siti Sundari, MSi selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis demi sempurnanya penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya segenap Dosen Jurusan Akuntansi yang telah membekali peneliti pengetahuan-pengetahuan yang sangat berguna dan berharga.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. dan seluruh staf serta karyawan Pemerintah Kota Surabaya yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian serta memberikan keterangan dan data yang berkenaan dengan usulan penelitian ini.
8. Secara khusus dengan rasa hormat menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Abah, Ummi, kakak dan adik beserta seluruh keluarga besarku yang telah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan banyak dukungan dan semangat serta doa restu, baik secara moril maupun materil.
9. Pihak-pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan waktu, pengalaman, dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT selalu melindungi, memberikan balasan segala kebaikan atas semua bantuan kepada peneliti.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya, Mei 2010

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.2.2 Pajak Daerah.....	18
2.1.2.1. Pengelompokan dan Tarif Pajak Daerah.....	20

2.2.3	Pajak Reklame.....	21
2.2.3.1.	Dasar Hukum.....	21
2.2.3.2.	Pengertian Pajak Reklame.....	22
2.2.3.3.	Obyek, Subyek dan Wajib Pajak.....	22
2.2.3.4.	Nilai Sewa Reklame	25
2.2.3.5.	Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.....	26
2.2.3.6.	Penyelenggaraan Reklame.....	28
2.2.3.7.	Ketentuan Perizinan	32
2.2.3.8.	Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame.....	39
2.2.3.9.	Sanksi Atas Penyelenggaraan Pajak Reklame....	43
2.2.4.	Pajak Hiburan.....	44
2.2.4.1.	Pengertian Pajak Hiburan.....	44
2.2.4.2.	Dasar Hukum Pajak Hiburan.....	45
2.2.4.3.	Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Hiburan.....	46
2.2.4.4.	Dasar Pengenaan dan tarif Pajak hiburan	47
2.2.4.5.	Tata Cara Pembayaran Dan Penetapan Pajak	48
2.2.4.6.	Jatuh Tempo Pajak Terutang	50
2.2.5.	Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	51
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	56
2.4.	Hipotesis.....	56

4.1.1.4. Stuktur Organisasi dan Tugas Pokok Dinas	
Pajak Kota Surabaya	76
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	84
4.2.1. Pajak Reklame di Kota Surabaya	84
4.2.2. Pajak Hiburan di Kota Surabaya	85
4.2.3. Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	86
4.2.4. Kontribusi Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88
4.3. Deskripsi Hasil Pengujian	89
4.3.1. Hasil Pengujian Normalitas	89
4.3.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	90
4.3.2.1. Hasil Pengujian Autokorelasi	90
4.3.2.2. Hasil Pengujian Multikolinieritas	91
4.3.2.3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	91
4.3.3. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda	92
4.3.4. Uji Kecocokan Model	94
4.3.5. Hasil Uji t	94
4.4. Pembahasan	96
4.5. Perbedaan Penelitian Yang Dilakukan Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu	99
4.6. Keterbatasan Penelitian	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009	8
Tabel 4.1	Target Dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2004 s/d 2009	84
Tabel 4.2	Target Dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2004 s/d 2009	85
Tabel 4.3	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 s/d 2009	87
Tabel 4.4.	Kontribusi Pajak Hiburan Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 s/d 2009	88
Tabel 4.5.	Kontribusi Pajak Reklame Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 s/d 2009	89
Tabel 4.6.	Hasil Uji Normalitas	90
Tabel 4.7.	Hasil Pengujian Multikolinieritas	91
Tabel 4.8.	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	92
Tabel 4.9.	Pengujian Regresi Linier Berganda	92
Tabel 4.10.	Hasil Uji F	94
Tabel 4.11.	Hasil Uji t	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Skema Kerangka Pemikiran	56
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Data
Lampiran 2	Input SPSS
Lampiran 3	Hasil Pengujian Normalitas
Lampiran 4	Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Lampiran 5	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Lampiran 6	Tabel F
Lampiran 7	Tabel t
Lampiran 8	Tabel Durbin Watson
Lampiran 9	Surat Keterangan Penelitian

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA
(Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)**

Oleh

FAIZAH WACHDIN

Abstraksi

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sepanjang tahun, sejak bergabungnya Dinas Pendapatan Daerah dengan bagian Keuangan Sekretariat Daerah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga sampelnya hanya memakai Data Pemerintah Kota Surabaya yang masih lengkap dan dapat diobservasi hanya untuk 6 tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dan Data Pemerintah Kota Surabaya yang masih relevan dengan keadaan saat ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda dengan menggunakan uji hipotesis uji F dan Uji t.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis penelitian, maka dapat disimpulkan model regresi linear yang dihasilkan cocok untuk melihat pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, hipotesis yang menyatakan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tidak teruji kebenarannya dan hipotesis yang menyatakan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya teruji kebenarannya.

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

(<http://www.thesis-ilmiah.com>).

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada

anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya ber-kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2001: 110), sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang Sah.

Menurut Yani (2002: 45), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program

pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah (ILPPD kota Surabaya, 2009). Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak reklame dan pajak hiburan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang. Atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Siahaan, 2005: 323).

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga (Siahaan, 2005: 297).

Kota Surabaya sebagai kota metropolis memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar *Laser Compact Disk* (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyaknya permasalahan reklame yang belum terselesaikan, mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat izin sampai terjadinya kebocoran di penerimaan pajak reklame, sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah.

Perizinan penempatan reklame di kota ini, tampaknya, sudah benar-benar tak terkendali. Buktinya, semakin hari semakin banyak ditemukan kasus papan reklame yang berdiri di lokasi terlarang. Sesuai SK Wali Kota Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan reklame, disebutkan beberapa kawasan yang terlarang untuk reklame. Di antaranya, persil-persil milik instansi pemerintahan atau Pemkot, taman kota, hutan kota, dan taman sekitar monumen. "Nyatanya, lihat saja. Apakah SK itu digubris? Di banyak tempat, larangan itu diabaikan. Sementara itu, Pemkot diam. Beberapa lokasi yang

semestinya harus, bebas reklame, tapi tetap didirikan papan promosi itu. Di antaranya di pojok Balai Pemuda, jalur hijau Jalan Diponegoro (reklame bando), Jalan A. Yani (sekitar Jembatan Mayangkara), dan Jalan Mayjen Sungkono. "Makin banyak saja reklame yang berdiri di jalur hijau atau kawasan bebas reklame, Itu belum termasuk pemasangan reklame di persil swasta yang konstruksinya menembus atap rumah. Kasus seperti itu juga sering dijumpai. Antara lain, di Jalan Kutai, Jalan A. Yani, dan Jalan Wonokromo. (Jawa Pos, 7 Maret 2006).

Selain itu juga, kota Surabaya sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame dan pajak hiburan. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan, adanya hiburan seperti pertunjukan film, bioskop, diskotik, karaoke, klab malam, bilyard, bowling, rekreasi air,

pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelenggarakan hiburan, maka pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang didalamnya terdapat dua faktor yaitu pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak reklame dan pajak hiburan. Dimana selama ini pajak reklame dan pajak hiburan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam enam tahun terakhir ini mengalami peningkatan, yang mana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009

Tahun	Target	Realisasi	Peningkatan (%)
2004	220.042.088.483,46	237.206.397.359,59	-
2005	260.671.201.247,00	269.195.758.082,00	13,48
2006	295.764.408.126,00	305.405.046.482,55	13,45
2007	331.746.732.406,00	340.833.935.422,00	11,60
2008	414.091.650.000,00	397.990.195.606,00	16,76
2009	486.582.620.000,00	442.685.431.333,00	11,23

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, penerimaan yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dapat tercapai, yaitu tahun 2004 pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 237.206.397.359,59 lalu meningkat menjadi Rp. 269.195.758.082,00 di tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 kembali meningkat menjadi Rp. 305.405.046.482,55, lalu pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 340.833.935.422,00 setelah itu pada tahun 2008 menjadi Rp. 397.990.195.606,00 dan pada tahun 2009 pendapatan asli daerah menjadi Rp. 442.685.431.333,00. Peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mempunyai arti bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah kota atas semua pajak daerah kabupaten/kotaa, yaitu salah satunya pajak reklame dan pajak hiburan yang mempunyai andil didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Namun bila dianalisis, selama periode pengamatan 6 tahun mulai dari tahun 2004 hingga 2009, pada tahun 2008 dan 2009 penerimaan pendapatan asli daerah yang ditargetkan tidak tercapai, hal ini dapat dilihat dari realisasi lebih kecil dari target.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten / kota yang dapat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. karena pajak reklame dan pajak hiburan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial karena tiap tahun jumlahnya selalu meningkat sehingga dapat menyumbang pendapatan kepada pemerintah daerah Kota Surabaya. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Listiarini (2003) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Peningkatan penerimaan pajak selama enam tahun mulai tahun 2004 sampai dengan 2009 tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan pemasangan reklame dan banyaknya tempat-tempat hiburan yang semakin berkembang dikota Surabaya. Hal ini merupakan sumber potensi yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame dan pajak hiburan, salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya ?
2. Apakah ada pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

2. Bagi Masyarakat

Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.